



Article Informations
Corresponding Email:
722devanrf@gmail.com

Received: 03/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

PENGARUH MILITARY TRAINING AREA (MTA) RI-SINGAPURA TERHADAP KEAMANAN NASIONAL INDONESIA 2022-2023

Devan Raysya Febriansyah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad
Yani

Abstrak

Dilatarbelakangi adanya kerja sama pertahanan antara Indonesia-Singapura yang mengizinkan militer Singapura untuk melaksanakan latihan militer di wilayah Indonesia, Kerja sama tersebut bernama *Military Training Area (MTA)* yang berada dalam payung kerja sama *Defense Cooperation Agreement RI- Singapura*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana pengaruh MTA Singapura terhadap keamanan nasional Indonesia pada tahun 2022-2024. Metode kualitatif digunakan untuk dapat membantu peneliti mengenai faktor-faktor politik, strategis, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaruh MTA Singapura terhadap keamanan nasional Indonesia. Penelitian bertujuan untuk meneliti bagaimana keberadaan MTA terhadap keamanan nasional di Indonesia dan juga untuk menilai efektivitas langkah langkah yang diambil oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara. Hasil penelitian adalah MTA memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap keamanan nasional dan keselamatan warga negara Indonesia. Dengan adanya MTA ini memberikan pengaruh positif pada sektor keamanan militer, politik, ekonomi, dan sosial. Adanya kepentingan Indonesia dalam paket kerja sama ini yaitu pengelolaan FIR dan perjanjian ekstradisi yang keduanya dapat memberikan pengaruh khususnya pada perekonomian Indonesia. Pengelolaan yang terstruktur dan kolaborasi antar pihak sipil-militer dibutuhkan untuk memaksimalkan manfaat dari adanya MTA dan meminimalkan dampak negatif dari kerja sama ini.

Kata Kunci: *Military Training Area*, Pengaruh, Indonesia, Singapura, Keamanan Nasional

Abstract

The background of the defense cooperation between Indonesia and Singapore in The Military Training Area (MTA) area used by the Singapore military is an area above Indonesian waters that Singapore uses for military exercises. With qualitative reseach, the purpose of this research is to examine how the influence of Singapore's MTA on Indonesia's national security in 2022-2024.

The MTA agreement between Indonesia and Singapore allows Singapore's military to conduct exercises in Indonesian territory under the RI-Singapore Defense Cooperation Agreement. This research examines the impact of the MTA on Indonesia's national security from 2022 to 2024, focusing on political, strategic, and policy factors. The findings reveal that the MTA positively influences Indonesia's military, political, economic, and social security, while also benefiting state sovereignty. Key elements of this cooperation include airspace (FIR) management and extradition agreements, which have economic implications for Indonesia. Effective collaboration between civil and military sectors is crucial to maximizing MTA benefits and minimizing risks. The results of the research shown that MTA has a strong and positive influence on Indonesia's national security and the safety of its citizens.

Keywords: Military Training Area, Influence, Indonesia, Singapore, National Security

PENDAHULUAN

Keamanan nasional merupakan konsep fundamental bagi sebuah negara. Menurut Marty Natalegawa, keamanan nasional sebagai suatu upaya negara untuk melindungi kepentingan, integritas, dan eksistensinya dari ancaman baik dari dalam maupun luar, konsep ini dalam hubungan internasional mengacu pada strategi dan kebijakan yang diterapkan untuk oleh negara untuk menjaga stabilitas global dan mencegah konflik (Natalegawa, 2013). Di dunia internasional, keamanan nasional dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana suatu negara terbebas dari ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan rakyat. Keamanan nasional juga menjadi pondasi suatu negara agar tercapainya tujuan nasional dan stabilitas kawasan. Di Indonesia, Keamanan nasional diamanatkan dalam konstitusi dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah. Konsep keamanan nasional yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan melindungi rakyat dan negara dari segala ancaman baik internal maupun eksternal. Sehingga demi menciptakan keamanan nasional, negara harus menciptakan keamanan baik di darat, laut, dan udara.

Singapura menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah yang cukup besar. Singapura hanya memiliki luas 710 km² dengan kurang lebih 1,444% adalah perairan, dengan luas tersebut Singapura memiliki 5,9 juta jiwa . Meskipun memiliki wilayah negara yang terbilang kecil namun

Singapura memiliki angkatan perang yang *modern*, sehingga mereka memerlukan area latihan untuk melatih angkatan bersenjata mereka khususnya angkatan laut dan angkatan udara. Mengingat Indonesia memiliki wilayah negara yang sangat luas dibandingkan dengan Singapura dan negara tetangga lainnya maka Indonesia bisa memberikan kesempatan kepada Singapura untuk memberikan beberapa daerah tertentu untuk digunakan oleh militer Singapura menggelar latihan militer. Oleh sebab itulah munculnya Kerjasama Pertahanan antara Indonesia dan Singapura yang disebut *Military Training Area (MTA)* pada tahun 1995 yang kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2007. Kemudian kerja sama MTA tersebut berganti nama menjadi *Defense Cooperation Agreement (DCA)*. Tentunya dengan adanya perjanjian ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar negara dan yang utama adalah perjanjian ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak (Asmadi, 2013).

Dalam kerja sama DCA salah satu yang dibahas ialah mengenai *Military Training Area (MTA)* yang akan digunakan oleh militer Singapura untuk berlatih di wilayah kedaulatan Indonesia. Perjanjian ini pertama kali dilakukan pada pemerintahan era Soeharto dalam bentuk MTA (*Military Training Area*) yang terbagi menjadi dua wilayah yakni MTA I di wilayah perairan Tanjung Pinang dan MTA II yang berada di Laut Cina Selatan. Kesepakatan ini dibentuk pada tahun 1995 namun dihentikan sepihak oleh Indonesia pada tahun 2003 karena pihak Singapura seringkali melanggar wilayah yang sudah ditetapkan dalam perjanjian MTA, serta Singapura kerap melibatkan pasukan negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia dalam latihan militernya. Sehingga Indonesia sejak saat itu tidak lagi memberikan izin MTA kepada Singapura. Pada dewasa ini kesepakatan MTA tersebut mengalami beberapa perubahan seperti pergantian nama kerja sama pertahanan yang semula dinamai *Military Training Area (MTA)* menjadi *Defense Cooperation Agreement (DCA)* yang didalamnya dimuat MTA yang terbagi menjadi Area Alpha 1, Alpha 2, dan Bravo yang semua area tersebut berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara dijelaskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Sistem pertahanan dipersiapkan dan diselenggarakan secara total, terpadu, dan berlanjut. Pengelolaan pertahanan negara diamanatkan dalam UU sebagai kegiatan strategis dan kebijakan yang diantaranya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.

Kedaulatan negara baik di darat, laut, maupun udara tentu harus dipertahankan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengamanatkan kedaulatan negara dalam visinya, yakni: "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong" (Hakim, 2019). Indonesia yang menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lokasi yang strategis di kawasan Asia karena diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudera yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari sepertiga daratan, dua per tiga lautan, dan tiga per tiga udara. Kedaulatan negara di udara menjadi hal yang krusial dibandingkan dengan daratan dan lautan dikarenakan pihak luar yang akan mengancam kedaulatan Indonesia tentu jauh lebih baik dilumpuhkan di udara sebelum berhasil masuk ke wilayah laut maupun darat di Indonesia (Priyatna, 2003) .

Ketika Indonesia meratifikasi perjanjian kerjasama tersebut maka Indonesia memberikan izin kepada Singapura untuk melakukan latihan militer dengan menggunakan peluru tajam dan peluru kendali serta mengajak negara lain untuk menggelar latihan bersama seperti yang tertuang pada perjanjian DCA Tahun 2007. Antara Indonesia dan Singapura, dalam konsep kedaulatan negara hal tersebut bertentangan dengan Hukum Internasional dan Piagam PBB

sehingga tidak bisa dilaksanakan. Menurut hukum internasional penyerahan penggunaan wilayah suatu negara kepada negara lain hanya bisa dilakukan jika diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni wilayah negara tersebut disewa oleh negara lain (*lease*) dan kategori lainnya berupa keadaan dimana kedaulatan wilayah sebagian dari suatu negara diserahkan kepada negara lain melalui suatu perjanjian dan wilayah tersebut untuk kepentingan negara lain atau bisa disebut *Servitude*. Dalam perjanjian DCA 2007 kedua hal tersebut sama sekali tidak dibicarakan.

Pada tahun 2022 ketika Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada pertemuan yang dinamakan Leaders Retreat yang diadakan di Bintan, Kepulauan Riau. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai permasalahan *Military Training Area* (MTA) yang sebelumnya mendapatkan penolakan dari DPR-RI di tahun 2007. Namun dalam pertemuan tersebut perjanjian yang sempat mendapatkan penolakan kembali ditinjau ulang dengan adanya penambahan perjanjian ekstradisi dan pengelolaan FIR. Ketiga perjanjian tersebut akan dilaksanakan ketika kedua parlemen di masing-masing negara telah meratifikasi perjanjian tersebut. Di Indonesia DPR-RI Komisi I telah melakukan pembahasan dan ratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 28 November 2022. Hingga saat ini kerjasama tersebut secara resmi sudah menjadi Undang-Undang dan dengan adanya Undang-Undang tersebut maka Singapura sudah diperbolehkan menggunakan wilayah kedaulatan Indonesia untuk digunakan sebagai tempat latihan militernya.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dapat mengeksplorasi dan memahami makna mendalam yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan proses seperti mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, mengumpulkan data-data yang spesifik mengenai suatu permasalahan, menganalisis data secara induktif dari tema-tema khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna dari penelitian yang telah dilakukan. Sehingga penelitian yang menggunakan metode kualitatif memiliki struktur laporan akhir

yang fleksibel (Creswell, 2016:4) . Dengan menggunakan pendekatan ini yang melibatkan analisis kebijakan yang diambil Indonesia dalam menjaga keamanan nasional Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran kedaulatan dan keamanan dari latihan militer yang diselenggarakan. Melalui analisis dokumen kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan resmi, dan laporan pemerintah, peneliti dapat mengidentifikasi tujuan kebijakan, strategi implementasi, dan pertimbangan politik yang mendasari kebijakan tersebut. penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Dengan menggunakan tipe penelitian ini peneliti dapat menggali akar masalah secara khusus dan mendalam, yang didasarkan pada data atau informasi yang telah peneliti kumpulkan sebelumnya. Peneliti juga akan menggunakan prosedur pengumpulan data dalam periode tertentu guna membuat deskripsi atau gambaran sistematis mengenai fakta dan akuratisasi data, serta hubungan antara fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, tipe penelitian deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pengaruh Military Training Area (MTA) RI-Singapura terhadap keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memfokuskan perhatian pada permasalahan- permasalahan sebagaimana semestinya saat penelitian berlangsung. Hasil akhir dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk diambil kesimpulan dari penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen kunci (*researcher as a key*) peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa mengumpulkan dokumen- dokumen kualitatif (*qualitative documents*). Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen publik seperti koran, majalah, makalah, laporan dan dokumen private seperti buku harian, surat, email. Dengan teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh bahasa dan kata-kata tekstual dari partisipan. Selain itu juga kelebihan teknik ini dapat diakses kapan saja, menyajikan data yang berbobot, dan sebagai bukti tertulis, serta data yang

diperoleh dapat menghemat waktu dan biaya. (Creswell, 2016:255)

PEMBAHASAN

Indonesia dan Singapura telah menjalin kerja sama dengan Singapura khususnya dalam bidang kerja sama pertahanan selama 50 tahun. Bentuk kerja sama tersebut tidak hanya dalam bentuk bilateral tetapi juga terdapat kerja sama regional. Pemerintah Indonesia dan Singapura telah secara aktif melakukan kerja sama dalam bidang lain seperti; politik, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, pendidikan, pariwisata, penanggulangan bencana hingga pemberantasan terorisme. Dalam bidang kerja sama pertahanan, kerja sama tersebut dimulai sejak tahun 1974 yang berlangsung hingga saat ini. kerja sama tersebut salah satu di antaranya meliputi latihan bersama Indopura. Untuk Angkatan Darat latihan tersebut bernama Safkar-Indopura, Angkatan Udara bernama Elang-Indopura, dan Angkatan Laut yang di beri nama Eagle-Indopura. Latihan bersama tersebut kemudian berakhir pada pertengahan tahun 1980-an yang kemudian dibentuk kembali kerja sama baru pada tahun 1989 (Ibrahim, 2015:65).

Pemerintah Indonesia dan Singapura melanjutkan kerja sama pertahanan pada tahun 1995 yang disebut sebagai kerja sama Military Training Area (MTA) yang ditandai dengan diratifikasinya dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic Of Indonesia and Government of The Republic Of Singapore on Military Training Areas 1 and 2 yang kemudian berakhir pada tahun 2003. Ketika kerja sama MTA berakhir, Pemerintah Singapura kemudian

mengajukan gagasan kerja sama baru dengan cakupan yang lebih luas dari kerja sama sebelumnya namun masih dalam cakupan yang sama, kerja sama tersebut disebut sebagai Defense Cooperation Agreement (DCA). Kerja sama DCA ini yang kemudian menjadi perhatian antara kedua pihak sejak tahun 2005. Kerja sama tersebut didorong berdasarkan kepentingan kedua negara yang melihat pentingnya kerja sama pertahanan. Dalam kerja sama tersebut Indonesia berkesempatan untuk menggunakan sistem persenjataan modern milik Militer Singapura, pertukaran informasi mengenai sistem latihan tempur modern, dan pembuatan persenjataan secara mandiri, yang tentunya semua yang ditawarkan pihak Singapura dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga bagi Militer Indonesia. Sedangkan dari Pihak Indonesia, Indonesia akan memberikan tempat untuk melaksanakan latihan dan simulasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) milik Singapura.

Kemudian pada tanggal 27 April 2007 yang berlokasi di Tampak Siring, Bali, kerja sama DCA ini resmi ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua negara pada saat itu. Indonesia ditandatangani oleh Menhan Juwono Sudarsono dan Singapura ditandatangani oleh Menhan Theo Chee Hean. Secara resmi kerja sama tersebut bernama Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic Of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore on Defence Cooperation/ DCA RI-Singapura). Pada dasarnya dalam kerja sama DCA tersebut merupakan sebuah

payung hukum dalam mengatur pemberian akses dan mekanisme latihan militer yang dilakukan kedua negara. Kerja sama tersebut akan berlaku selama 25 tahun terhitung sejak pihak terkait telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat bagi Indonesia khususnya TNI dalam meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pertahanan Indonesia.

Namun kerja sama ini pada tahun 2007 mengalami kendala dikarenakan tidak mendapatkan persetujuan DPR-RI meskipun sebelumnya perjanjian tersebut sudah di tandatangan oleh Menteri Pertahanan kedua negara. Kendala yang ditimbulkan pada saat itu karena banyak pihak yang merasa bahwa kerja sama DCA tidak menguntungkan pihak Indonesia jika kerja sama tersebut dijalankan, terlebih MTA lah yang menjadi poin penting dalam kerja sama tersebut menjadi terhambat (Rizal, 2009:78).

Kemudian pertemuan yang dilaksanakan di Bintan, Kepulauan Riau pada tanggal 25 Januari 2022 menjadi titik balik kerja sama ini. Pertemuan yang dinamakan Leaders Retreat yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong secara langsung menyatakan komitmen kedua negara untuk menjadikan DCA RI- Singapura menjadi payung kerja sama yang secara garis besar meliputi; pertukaran informasi intelejen, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan, peningkatan sumber daya manusia di institusi pertahanan, pertukaran personel militer dengan saling menghadiri kursus- kursus dan program-program militer baik secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama

termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu, serta kerja sama SAR (*Search And Rescue*).

Pengaruh Military Training Area (MTA) RI-Singapura Terhadap Keamanan Nasional Indonesia

1) Keamanan Militer

Konsep keamanan dan pertahanan negara di Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan non-militer. Dalam pertahanan militer meliputi operasi militer perang dan operasi selain perang. Sedangkan untuk non-militer berupa pemberdayaan sumber daya nasional yang meliputi penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, dan pengembangan teknologi.

Kerja sama DCA ini didasarkan pada kebutuhan Militer Singapura yang memerlukan lokasi latihan, meskipun begitu Militer Singapura memiliki anggaran militer terbesar di kawasan. Dengan adanya anggaran yang besar tersebut menjadikan Singapura memiliki teknologi militer yang modern, di sisi lain Militer Indonesia memerlukan latihan bersama untuk mengasah kemampuan tempur dalam menggunakan persenjataan modern yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional Indonesia.

Pada tahun 2015 Menhan Indonesia dan Menhan Singapura menyatakan keinginannya untuk memperkuat hubungan bilateral yang menyangkut empat pilar baru yang disepakati bersama, empat pilar tersebut diantaranya:

- a. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama melalui hubungan antara kedua angkatan bersenjata dalam bidang keamanan seperti keamanan maritim, kontra-terorisme, bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana
- b. Meningkatkan interaksi antara kementerian pertahanan dan militer berupa pelatihan bersama
- c. Melaksanakan dialog antar kementerian pertahanan mengenai isu-isu kawasan yang sedang berkembang

untuk kepentingan kedua negara

- d. Mengeksplorasi hal-hal baru yang berupa interaksi antar militer kedua negara yang memberikan banyak manfaat bagi TNI dan Singapore Armed Force (SAF)

Dengan adanya kerja sama MTA yang meliputi kerja sama militer yang berguna untuk menjaga dan melindungi keutuhan NKRI terhadap segala macam ancaman tradisional dan non-tradisional. Dikarenakan ancaman keamanan tidak mengenal waktu dan batas negara, menjadikan diperlukannya kerjasama baik secara multilateral dan bilateral untuk menghadapi dan mengurangi ancaman tersebut.

Dalam pasal 3 DCA RI-Singapura telah diatur bentuk kerja sama latihan yang melibatkan TNI dan SAF yang berkaitan dengan latihan baik antara Angkatan Bersenjata Indonesia-Singapura atau dengan angkatan bersenjata negara lainnya yang dilaksanakan di wilayah Alpha dua, dan di perairan serta langit Indonesia di wilayah Bravo dengan syarat latihan yang melibatkan angkatan bersenjata negara lain harus dilakukan atas seizin Indonesia dengan pengawasan dari Indonesia. Indonesia juga akan menjamin keamanan dan kedaulatan negara dalam hal pelaksanaan latihan gabungan yang melibatkan negara lain.

Selain itu terdapat peraturan khusus mengenai pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan fasilitas latihan bersama antara Indonesia dan Singapura, keuntungan yang didapat berupa Singapura akan membantu membangun sarana pendukung tersebut beserta dengan fasilitas latihan bersama yang dibutuhkan selama kerja sama ini berlangsung.

2) **Keamanan Politik**

Dengan adanya kerja sama dalam bidang Military Training Area antara Indonesia dan Singapura berpengaruh pada mempererat hubungan bilateral dan meningkatkan kepercayaan antara kedua negara yang akan berdampak

pada penguatan kerja sama di sektor lainnya yang tentunya akan berdampak pada keamanan nasional Indonesia. Dalam perjanjian ini kedaulatan dan integritas wilayah tempat dilaksanakannya MTA diterapkan dengan prinsip kesepahaman, saling percaya, saling menghormati. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini berarti kedua negara telah sepakat untuk saling menghormati dan tidak akan dipengaruhi oleh urusan dalam negeri masing-masing negara termasuk urusan politik. Jika terjadi permasalahan akibat politik kedua negara maka dalam kerja sama ini telah diatur bagaimana dan langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan. Setiap hal yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan perjanjian ini akan disampaikan pada komite kerja sama pertahanan guna penyelesaian secara damai dan kemudian disampaikan pada menteri pertahanan. Jika tidak dapat diselesaikan maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh pihak terkait melalui saluran diplomatik.

3) **Keamanan Sosial**

Keamanan sosial menjadi salah satu isu yang dibahas dalam kerja sama ini. Dalam kerja sama ini lebih lanjut membahas mengenai pengamanan selat malaka

yang tentunya akan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat sekitar. Selat malaka yang menjadi bagian dari tiga negara (Indonesia, Singapura, dan

Malaysia) merupakan salah satu jalur komunikasi dan transportasi laut yang menjadi elemen penting bagi perekonomian global. Dikarenakan jalur tersebut menjadi jalur bagi sebagian besar kapal tanker di dunia yang bahkan melewati jalur ini setiap harinya. Dikarenakan jalur ini strategis menjadikan peluang bagi beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan barang-barang secara ilegal ke penjuru dunia. Selain itu kejahatan transnasional seperti terorisme dan perompakan menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan masyarakat yang berada disekitar jalur ini, tak sedikit juga masyarakat

yang bergantung pada laut seperti nelayan yang tak luput dari permasalahan tersebut. sehingga pada tahun 2004 dibentuklah “*Malsindo Trilateral Coordinated Patrol*” yang berupa patroli bersama antara tiga negara . Dengan adanya kerja sama baik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral untuk menjaga keamanan khususnya keamanan sosial dari ancaman serta gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri seperti ancaman penyelundupan manusia, penyelundupan obat terlarang, penjualan senjata api, dan perompakan laut menjadi pondasi akan adanya kerja sama yang dijalin antara Pemerintah Indonesia dan Singapura, kerja sama yang dilakukan tentu harus berdasarkan keadilan, saling menghormati, dan menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan dan keamanan nasional masing-masing negara.

Selain melakukan patroli bersama, dalam ruang lingkup kerja sama antara Indonesia dan Singapura dalam pasal dua DCA dijelaskan bahwa terdapat kerja sama *Search And Rescue* (SAR) dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah pihak terkait . Dalam konteks bantuan kemanusiaan dengan adanya kerja sama ini membuka peluang agar kedua negara saling mendukung ketika situasi darurat bencana terjadi. Jika situasi darurat tersebut terjadi maka kedua negara dapat bekerja sama dalam bentuk pemberian bantuan, baik bantuan yang berbentuk tenaga medis, logistik, maupun sumber daya manusia. Dengan adanya kerja sama tersebut dapat mempererat hubungan diplomatik dan meningkatkan keamanan sosial antara kedua negara.

Namun tentu dibalik terciptanya rasa aman yang diberikan dengan adanya patroli dan latihan bersama militer kedua negara, peneliti melihat terdapat salah satu isu yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia mengenai aktivitas latihan militer yang dapat mengganggu aktivitas dan mata pencaharian penduduk yang bertempat tinggal di sekitar daerah latihan. Gangguan yang

diakibatkan dari penggunaan alutsista berupa manuver yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pesawat tempur maupun kapal tempur serta ancaman lain yang berasal dari penggunaan peluru kendali dan peluru tajam yang dapat memperbesar resiko kecelakaan yang ditimbulkan dari latihan militer ini. Tentunya Pemerintah Indonesia harus menempatkan keamanan masyarakatnya ke prioritas utama dan sudah seharusnya kewajiban pemerintah untuk menciptakan aspek security dan prosperity demi keberlangsungan hidup masyarakatnya dan untuk memenuhi aspek keamanan nasionalnya.

Dengan diberlakukannya kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang baik antara masing-masing angkatan bersenjata yang akan menciptakan kestabilan, kedamaian, dan kemakmuran yang akan berdampak pada keamanan nasional Indonesia dan keamanan dunia. Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat memberikan perhatian dan keamanan yang lebih bagi masyarakat yang berada di wilayah tempat MTA diberlakukan.

4) **Keamanan Ekonomi**

Selain dalam bidang pertahanan dan keamanan, kerja sama ini juga berpengaruh pada keamanan ekonomi kedua negara. Kerja sama ini juga mencerminkan komitmen kedua negara untuk membangun stabilitas keamanan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kerja sama ini keamanan ekonomi mencakup berbagai upaya untuk melindungi infrastruktur vital, kelancaran perdagangan dan investasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Di bidang perdagangan Singapura menjadi mitra dagang strategis bagi Indonesia dan terbesar di kawasan ASEAN, dengan 17% dari total perdagangan. Di tahun 2022 saja nilai perdagangan bilateral mencapai US\$ 33,8 miliar, meningkat 24,6% jika dibandingkan pada tahun 2021. Nilai tersebut merupakan

yang tertinggi ke-2 dalam lima tahun terakhir dan terbesar setelah pandemi. Sedangkan Singapura merupakan investor asing terbesar di Indonesia sejak tahun 2014. Pada tahun 2023 saja Singapura telah menginvestasikan US\$ 7,7 miliar. Hal tersebut menunjukkan rasa percaya yang kuat terhadap prospek dan potensi kerja sama kedua negara.

Dengan keberadaan DCA ini sebagai penunjang agar keamanan ekonomi berjalan dengan lancar dan aman, selat Malaka yang dilalui banyak kapal-kapal barang dapat dengan mudah menarik perhatian pembajak kapal. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pembajak ini dengan diberlakukannya kerja sama militer Singapura dan Indonesia dalam DCA. Kerja sama ini menjadi pilihan kedua negara untuk saling menjaga aset perekonomian mereka yang menjadi perhatian kedua negara. Dengan adanya kehadiran militer yang berupa latihan bersama dapat digunakan untuk penjagaan dari segala bentuk ancaman.

Selanjutnya persoalan mengenai pengakuisisian FIR Natuna dan Kepulauan Riau dari Singapura ke Indonesia yang menjadi salah satu paket perjanjian dalam berjalannya kerja sama ini. Pengelolaan FIR yang semula dikelola oleh Singapura nyatanya memberikan kerugian di sektor ekonomi bagi Indonesia yang membuat Indonesia tidak dapat mengelola wilayah udaranya. Terdapat temuan bahwa pengelolaan FIR yang dilakukan oleh Singapura terdapat kerugian ekonomi bagi Indonesia dan terdapat sejumlah *Rans Charge* yang seharusnya dibayarkan oleh Singapura kepada Indonesia. Mengingat penerbangan menuju Singapura ini sangat padat, jika pengelolaan FIR kembali ke Indonesia maka akan berdampak pada ekonomi berupa pemasukan di bidang pelayanan navigasi yang tentunya selama ini didapatkan Singapura.

Selain pengelolaan FIR terdapat kesepakatan lainnya

yang berpengaruh pada sektor ekonomi yaitu paket perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi sudah sangat didambakan oleh Indonesia sejak tahun 1970-an disaat Indonesia sudah terlebih dahulu membuat perjanjian ekstradisi dengan negara lain seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Perjanjian tersebut sudah digagas o sejak tahun 1979 perihal ekstradisi koruptor dan pelaku tindak kejahatan ekonomi lainnya namun tidak ada respon dari Singapura dengan alasan perbedaan sistem hukum sehingga sulit untuk diimplementasikan. Perjanjian ekstradisi yang dimaksud menyangkut 31 tindak kejahatan seperti terorisme, korupsi, penyuapan, pemalsuan, pelanggaran hukum perusahaan, dan kepailitan. Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini Pemerintah Indonesia dan Singapura dapat dengan luas melacak dan mengejar tersangka kasus korupsi dan memulangkan seluruh aset-asetnya yang disimpan di Singapura. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa perjanjian ini akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pidana yang berada di Singapura. Upaya ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi rakyat Indonesia. Dengan adanya perjanjian ekstradisi maka Indonesia memiliki peluang untuk memulangkan buronan dengan status tersangka, terdakwa, maupun terpidana yang melarikan diri ke Singapura. Perjanjian tersebut juga dapat bersifat preventif atau pencegahan di masa yang akan datang jika terdapat pelaku tindak pidana yang akan melarikan diri ke Singapura.

Dengan adanya kerja sama ini tentu Indonesia mendapatkan cukup banyak pengaruh positif terhadap keamanan ekonomi yang dimulai dari patroli bersama pengamanan jalur perdagangan kedua negara dan internasional, pengelolaan FIR yang keuntungannya ekonominya bisa dirasakan oleh Indonesia dengan

mengelola wilayah udara mereka dengan jalur penerbangan internasional, dan perjanjian ekstradisi yang juga dapat memberikan keuntungan dari segi ekonomi dikarenakan seluruh aset-aset tindak pidana khususnya korupsi yang dibawa ke Singapura dapat dikembalikan ke Indonesia serta tindakan preventif untuk mencegah pelarian dari tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke Singapura di masa yang akan datang.

5) **Keamanan Lingkungan**

Keamanan Lingkungan menjadi faktor terakhir demi terciptanya keamanan nasional suatu negara. Dalam latihan tempur Singapura memiliki agenda tersendiri, yakni mereka ingin melaksanakan latihan tempur tetapi tidak ingin merusak ekosistem laut mereka. Dengan demikian Singapura ingin mendapatkan tempat latihan (*Military Training Area*) yang tidak membahayakan ekosistem nasionalnya dikarenakan ekosistem lautnya yang terbatas. Menembakkan peluru ke laut berpeluang untuk membuat kerusakan lingkungan yang dapat membunuh ikan-ikan dan merusak terumbu karang. Sedangkan Indonesia menjadi lokasi yang ideal dikarenakan memiliki lautan yang luas untuk tempat latihan militer. Jika latihan militer angkatan bersenjata Singapura dilaksanakan di wilayah Singapura maka dapat mengancam para wisatawan yang berada di kawasan latihan militer.

Military Training Area berpotensi dapat mengganggu ekosistem di wilayah laut Indonesia dikarenakan penggunaan alutsista dan juga senjata karena seringkali wilayah yang digunakan sebagai tempat latihan ini telah terbebas dari pembangunan, pertanian, hingga kegiatan lainnya. Area latihan biasanya terbagi menjadi dua wilayah, wilayah yang sering terganggu oleh kendaraan, peluru, hingga bom serta wilayah lain yang relatif aman dan tidak terganggu. Namun terdapat studi di Polandia yang mengatakan bahwa *Military Training Area* ini tidak secara

merugikan keanekaragaman hayati karena area khusus ini tidak terlalu di intervensi oleh manusia dalam jangka waktu yang lama . Sedangkan di Jerman terdapat studi yang mengatakan bahwa makhluk hidup seperti serigala cenderung mencari mangsa di area latihan militer, dikarenakan area tersebut steril dari manusia sehingga terbebas dari perburuan liar yang menyebabkan terdapat makanan yang melimpah bagi keberlangsungan hidup mereka.

Dalam kerja sama ini MTA Pulau Anambas yang menjadi Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

. Pulau tersebut berlokasi di Kepulauan Riau, lebih tepatnya berada di sekitar wilayah Alpha 2 dalam perjanjian MTA. Meskipun letak Pulau Anambas secara spesifik tidak berada di dalam zona Alpha 2, namun tidak menutup kemungkinan dampak dari latihan militer tersebut dapat berpengaruh pada kerusakan lingkungan konservasi laut anambas.

Peneliti menemukan data bahwa dampak dari latihan militer di wilayah perairan Indonesia dapat merusak lingkungan laut beserta ekosistemnya yang diakibatkan dari penembakan roket yang akhirnya jatuh ke laut dan dapat merusak dan menimbulkan kebisingan bagi biota laut. Kelestarian lingkungan laut sudah pasti terancam karena air laut sudah tercemar dengan pecahan peluru, selain itu habitat biota laut dan terumbu karang dapat terganggu bahkan rusak yang tentunya akan merugikan Indonesia sebagai tuan rumah dari MTA ini. Rusaknya biota laut tersebut membutuhkan waktu pemulihan selama bertahun-tahun yang tentunya akan mengakibatkan pada terganggunya ekosistem . Penelitian lain mengungkapkan bahwa bahan kimia yang digunakan dalam amunisi dan kendaraan militer dapat mencemari tanah dan sumber air. Sisa-sisa bahan peledak, minyak,

dan bahan bakar yang tertinggal di lapangan dapat meresap ke dalam air dan menciptakan resiko polusi kimia yang berbahaya bagi flora dan fauna dan bahkan manusia yang tinggal di sekitar area tersebut.

Peneliti melihat bahwa kerja sama ini tidak dapat memberikan dampak yang positif bagi keamanan lingkungan, dikarenakan peneliti tidak dapat menemukan pengaruh positif khususnya dalam kerja sama ini. Penggunaan peluru kendali, bom, hingga manuver alutsista dapat berpengaruh pada kerusakan ekosistem laut, terlebih jika terdapat senyawa-senyawa berbahaya yang dihasilkan dari penggunaan persenjataan tersebut. Terlebih MTA ini berdekatan dengan kawasan konservasi perairan nasional di Pulau Anambas yang dapat berpengaruh buruk bagi kawasan konservasi tersebut. Meskipun dalam menyusun pertahanan negara harus disusun salah satunya berdasarkan prinsip lingkungan hidup, namun hal tersebut harus menjadi perhatian dari kedua negara karena DCA ini merupakan perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dimana negara harus memenuhi seluruh hak dan kewajiban yang tertera dalam undang-undang tersebut.

Namun demikian, terdapat mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah yang dapat diambil berupa pembuatan zona buffer di sekitar MTA untuk melindungi habitat sensitif, penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah militer yang lebih baik. Perlunya pemantauan dari pihak terkait khususnya Indonesia sebagai observer untuk memastikan bahwa kegiatan latihan militer di MTA tidak menyebabkan kerusakan berat pada wilayah laut Indonesia.

KESIMPULAN

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kerja sama ini sempat mengalami berbagai kendala yang menyebabkan adanya

ketidakjelasan dari kerja sama ini di tahun 2007 dikarenakan kerja sama tersebut tidak berhasil di ratifikasi oleh DPR-RI. Sehingga Singapura menawarkan paket perjanjian lainnya selain MTA yaitu perjanjian pengelolaan FIR dan perjanjian ekstradisi kepada Indonesia.

Dalam analisa mengenai pengaruh MTA terhadap keamanan nasional Indonesia, penulis berargumen bahwa setidaknya terdapat lima faktor yang harus dipenuhi agar terciptanya kemandirian nasional suatu negara. Pertama keamanan militer dimana TNI akan mendapatkan banyak manfaat positif dari adanya kerja sama ini seperti latihan bersama, pertukaran informasi teknologi, pertukaran alutsista, dan pembangunan sarana pendukung untuk pelaksanaan latihan bersama. Kedua keamanan politik yang berpengaruh pada mempererat hubungan bilateral dan meningkatkan kepercayaan antara kedua negara yang akan berdampak pada penguatan kerja sama di sektor lainnya. Ketiga keamanan sosial berupa pengamanan selat malaka yang tentunya akan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat namun di sisi lain dengan adanya MTA juga dapat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

Keempat keamanan ekonomi yang dalam konteks kerja sama ini keamanan ekonomi mencakup berbagai upaya untuk melindungi infrastruktur vital, kelancaran perdagangan dan investasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi bagi kedua negara dengan terjaminnya keamanan di selat malaka. Faktor terakhir adalah keamanan lingkungan yang menurut peneliti dengan adanya latihan militer di wilayah MTA ini akan berpotensi pada rusaknya lingkungan, terlebih kepulauan anambas merupakan wilayah konservasi laut. Meskipun terdapat mitigasi yang dapat dilakukan dan perlunya pengawasan yang ketat dari Pemerintah Indonesia agar tidak terciptanya kerusakan lingkungan ketika sedang melaksanakan latihan militer.

Peneliti berkesimpulan bahwa MTA memiliki pengaruh yang kuat terhadap keamanan nasional Indonesia. Kerja sama ini merupakan suatu kerja sama yang membawa pengaruh positif

untuk menciptakan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia. Dengan adanya MTA ini memberikan pengaruh positif pada sektor keamanan militer, politik, ekonomi, dan sosial. Peneliti juga melihat adanya kepentingan Indonesia dalam paket kerja sama ini yaitu pengelolaan FIR dan perjanjian ekstradisi yang keduanya dapat memberikan pengaruh khususnya pada perekonomian Indonesia. Pengelolaan yang terstruktur hingga diperlukannya kolaborasi antar pihak sipil-militer menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dari adanya MTA dan meminimalkan dampak negatif dari kerja sama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. Kedaulatan Negara di Ruang Udara. Jakarta: Fikahati Aneska, 2003
- Asmadi, Eko D., Pendahuluan, Legitimasi Defence Cooperation Agreement Indonesia-Singapura. Oleh Laksamana Muda TNI Eko Djalmo Asmadi, M.H. Jakarta: Indonesia Press, 2013. 3.
- Baldwin, David Allen. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press, 1993
- Beuger, Christian dan Edmund, Timothy. "Beyond seablandness: a new agenda for maritime security studies," *International Affairs*. Vol 93 No 6(2017) 1293-1311
- Creswell, John W., Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Hakim, Chappy. FIR di Kepulauan Riau: Wilayah Udara Kedaulatan NKRI. Jakarta: Kompas, 2019
- Hakim, Chappy. Membangun Ibu Pertiwi & Bapak Bangsa: Membangun Pertahanan Keamanan Negara. Jakarta: Kompas, 2016.
- Hakim, Chappy. Menata Ulang Penerbangan Nasional. Jakarta: Kompas, 2019.
- Herz, John H. "Idealist Internationalism and the Security Dilemma," *World Politics*. Vol. 2 No. 2 (1950) 157-180
- Jackson, Robert., dan Sorensen, Georg. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Terj. Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Jervis, Robert. "Cooperation Under The Security Dilemma," *World Politics*. Vol 30 No. 2 (1978) 167-214.

- Jr, Albert I. Moon. "A Look at Airspace Sovereignty," *Journal Of Air Law and Commerce*. Vol. 01 No. 2 (1963) 328-345.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael. *Qualitative data analysis : an expanded sourcebook*. California: Sage Publications, 1994.
- Milia, Jana., Kurniawan, Yandi., dan Poespito Hadi, Wibisono. "Analysis Of Defense Cooperation Agreement Between Indonesia and Singapore In 2007-2017 Through Defense Diplomacy Goal Variable," *Jurnal Pertahanan*. Vol 4 No. 2 (2018) 104-119.
- Mukhtar, Sidratahta. "Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya Di Indonesia" *Sociae Polities*. Vol. 1 No. 2 (2017) 128-137.
- Natalegawa, Marty. *Diplomasi Pertahanan: Merangkul Dalam Bentuk Soft Power*. Jakarta: Kompas, 2013
- Parulian, Yoshua., Utomo, Hari., dan Yusnaldi. "Analisis Confidence Building Measures (CBMs) Terhadap Kerja Sama Bilateral Pertahanan Antara Indonesia Dengan Singapura," *Jurnal Keamanan Maritim*. Vol. 5 No. 2 (2019) 87-101.
- Rizal, Syamsu. "Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura Ditinjau Dari Perspektif Ketahanan Nasional." Tesis, Universitas Indonesia, 2009.
- Rubenstein, Alvin Z., *Red Star on the Nile: The Soviet-Egyptian Influence Relationship Since the June War*. Princeton: Princeton University Press, 2016.
- Siraji, Hafizh. "The Sovereignty of the Air Space and Its Protection in the Perspective of International Law: Contemporary Developments," *International Law Discourse In Southeast Asia*. Vol. 1 No. 2 (2022)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhartono., Dwiyanto, D. Herly., dan D.A.R., Deni. "Realignment Flight Information Region Singapura Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Nasional," *Jurnal Strategi Pertahanan Udara*. Vol. 5 No. 1 (2019)
- Sweeney, Edward C., "Adjusting the Conflicting Interests of Landowner and Aviator in Adjusting the Conflicting Interests of Landowner and Aviator in Anglo-American Law," *Journal Of Air Law and Commerce*. Vol. 29 No. 4 (1963)
- Tim CNN Indonesia," Prabowo Soal Bernegara: Tak Ada Kawan dan Lawan Abadi." CNN Indonesia (10 Juli 2021) internet. 15 Maret 2024, www.cnnindonesia.com
- Waltz, Kenneth. *Theory Of International Politics*. Berkeley: Addison-Wesley Publishing, 1979